

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**Julita Br. Samosir \***

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (Pasal 2 dan Pasal 6) serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada beberapa Pasal yaitu Pasal 167, Pasal 242, Pasal, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266, Pasal 274, serta Pasal 385 KUHP. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah adalah dikenakan Pasal 385 KUHP yang merupakan satu-satunya Pasal yang langsung terkait penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pada Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penegakan hukum pidana penyerobotan tanah adalah kurangnya ahli kepolisian, alas hak belum tervalidasi, tidak jelas pemilik tanah, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi pengurus daerah setempat dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, saksi-saksi sulit dimintai keterangan karena pindah domisili bahkan meninggal dunia dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah ancaman pidananya sangat rendah.

**Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Penyerobotan Tanah**

---

\*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT IN CRIMINAL ACTION OF LAND ENTREPRENEURSHIP (Case Study in North Sumatra Regional Police)**

**Julita Br. Samosir \***

*Law enforcement against criminal cases of land grabbing,, must also prioritize the values of justice, in addition to legal certainty and expediency. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the law on criminal acts of land grabbing in Indonesia, how to enforce the law against criminal acts of land grabbing that occur under the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, what are the obstacles and law enforcement efforts against criminal acts of land grabbing by the North Sumatra Regional Police.*

*The research conducted was normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Arrangements for criminal acts of land grabbing are regulated in several statutory provisions, including Law Number 51 Prp. The year 1960 stated that the use of land without a permit with the right or legal proxy is an act that is prohibited and punishable by criminal penalties (Article 2 and Article 6) and is regulated in the Criminal Code in several articles, namely Article 167, Article 242, Article , Article 263, Article 264, Article 266, Article 274, and Article 385 of the Criminal Code. Law enforcement against criminal acts of land grabbing is subject to Article 385 of the Criminal Code which is the only article directly related to land grabbing and is categorized as a crime. Especially in Article 385 paragraph (1) of the Criminal Code.*

*Based on the results of the research it is understood that the obstacles to enforcing criminal law on land grabbing are the lack of police expertise, the reasons for rights have not been validated, unclear landowners, lack of public awareness, lack of participation of local regional administrators in carrying out socialization and legal counseling, witnesses are difficult to question because they have moved domicile even died and the court's decision regarding the crime of land grabbing carries a very low penalty.*

**Keywords: Police, Law Enforcement, Land Acquisition**

*\* Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra*